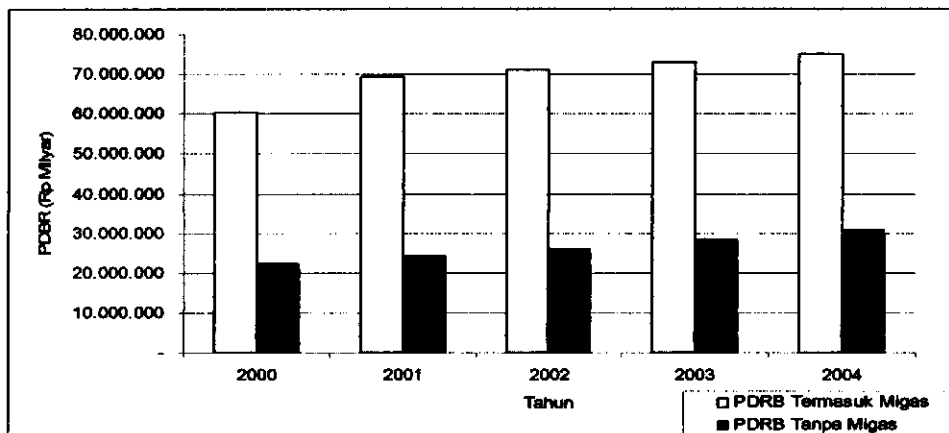


I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang kaya akan sumber daya alam di Indonesia. Produksi minyak bumi Provinsi Riau sekitar 50 persen dari total produksi minyak bumi Indonesia, atau sebesar 600.000 barel per hari. Areal kelapa sawit yang dimiliki merupakan areal yang terluas, yakni sebesar 1.486.217 hektar, atau sekitar 25,3% dari total luasan kelapa sawit Indonesia, dengan produksi, volume ekspor dan devisa yang dihasilkan masing-masingnya sebesar 3.822.228 ton, 2.020.760 ton dan US\$ 650.833.000. Provinsi Riau juga memiliki kebun karet seluas 547,1 ribu hektar, kelapa seluas 633,1 ribu hektar dan berbagai jenis tanaman perkebunan lainnya serta 3,84 juta hektar hutan. Kekayaan sumber daya alam ini mendorong peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Riau (atas dasar harga konstan 2000) sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1, memacu pertumbuhan ekonomi (tanpa migas) yang selama periode 2001 - 2004 berkisar antara 7,98% - 8,95%, jauh lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode yang sama yang berkisar antara 5,09% - 6,17%. PDRB per kapita (tanpa migas) Provinsi Riau pada tahun 2004 sebesar Rp 7,26 juta, berada pada urutan ke 5 terbesar di Indonesia setelah DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau dan Papua.



Sumber: BPS Provinsi Riau (2005)

Gambar 1. Perkembangan PDRB Provinsi Riau Atas dasar harga konstan 2000-2004.

Kekayaan sumber daya alam yang melimpah justru bertolak belakang dengan keadaan perekonomian penduduk. Tingkat kemiskinan penduduk Riau relatif tinggi di Indonesia bila ditinjau dari aspek pengeluaran, yaitu jumlah rupiah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara fisik yang setara dengan 2.200 kalori sehari dan pengeluaran minimal untuk perumahan, pendidikan, kesehatan dan transportasi. Jumlah Rupiah untuk memenuhi kebutuhan minimal ini disebut dengan 'garis kemiskinan' (*poverty line*), dimana sebesar Rp 124.746/kap/bulan pada tahun 2002 dan 168.391/kap/bulan pada tahun 2003. Berdasarkan garis kemiskinan, jumlah penduduk Riau yang berada dibawah garis kemiskinan pada tahun 1996 sebanyak 376.519 jiwa (9,9%) dari total penduduk Riau (Daratan dan Kepulauan). Krisis ekonomi, sosial dan politik yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 berakibat jumlah penduduk miskin di Riau meningkat tajam. Pada tahun 2000, 2002 dan 2003, jumlah penduduk miskin di Riau Daratan (11 Kabupaten/Kota) berturut-turut adalah 438.568 jiwa (11,7%), 634.896 jiwa (15,4%) dan 661.677 jiwa (15,6%).

Pada tahun 2004, Balitbang Provinsi Riau bekerja sama dengan BPS melakukan pendataan Penduduk dan Keluarga Miskin di Provinsi Riau dengan menggunakan delapan variabel yang dikombinasikan dari kriteria kemiskinan BPS dan BKKBN. Variabel tersebut meliputi; (a) frekuensi makan minimal 2 kali sehari, (b) konsumsi lauk pauk berprotein tinggi, (c) memiliki pakaian yang berbeda untuk kegiatan yang berbeda, (d) kepemilikan asset, (e) luas lantai per kapita, (f) jenis lantai, (g) ketersediaan air bersih dan (h) kepemilikan jamban. Hasil pendataan tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin Provinsi Riau sebanyak 1.008.321 jiwa (22,19%) atau 231.508 rumah tangga (22,68%).

Fenomena ini mengindikasikan bahwa kemiskinan tersebut bukan disebabkan oleh kemiskinan alami, tetapi lebih disebabkan oleh kemiskinan struktural yang multidimensional, atas kekurangan akses masyarakat menjangkau haknya. Wardhani dan Haryadi (2004) menyatakan bahwa kemiskinan struktural merupakan akibat atau hasil bekerjanya kekuatan makro-sosiologis dalam masyarakat, yaitu berupa proses yang menjauhkan rakyat dari kepemilikan dan pengendalian sumberdaya ekonomi,

sosial dan politik, yang berarti pula sebagai akibat dari ketidakadilan struktural. Disatu sisi, ketidakadilan struktural terwujud sebagai suatu proses pemelaran massa dan diujung yang lain ketidakadilan struktural terwujud sebagai perampasan hak-hak dasar manusia yang dengan sendirinya terkait pada masalah pembagian kesempatan.

Membengkaknya tenaga pengangguran turut berimplikasi terhadap daya beli masyarakat, keadaan semakin memprihatinkan karena masyarakat sudah tidak mampu lagi memproduksi sebagai upaya pemenuhan kebutuhan akan sandang, pangan, dan kesehatan. Dalam situasi yang memprihatinkan ini, perlu dilakukan pembangunan yang tepat untuk masyarakat.

Perubahan paradigma pembangunan sekarang adalah pembangunan oleh, dari, dan untuk masyarakat (*people centered development*). Menyikapi hal tersebut, pemerintah Provinsi Riau melalui Badan Pemberdayaan Dan Perlindungan Masyarakat melaksanakan program strategis yang tertuang dalam program pemberdayaan desa (PPD) yang juga sesuai dengan konsep K2I (penanggulangan kemiskinan-kebodohan dan infrastruktur). Program ini dilaksanakan pada 48 Desa pada tahun 2005 dan 59 Desa pada tahun 2006.

Hakekat dari PPD adalah berupaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan dengan fokus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan si miskin beserta keluarganya baik dengan meningkatkan usaha yang ada maupun dengan menciptakan kesempatan usaha.

Tersedianya Dana Usaha Desa yang dapat dimanfaatkan oleh keluarga miskin sangat diperlukan agar mereka dapat mengembangkan skala usaha ke skala usaha ekonomis serta meningkatnya produktifitas. Peningkatan produktifitas usaha keluarga miskin ini diharapkan juga akan meningkatkan pendapatan yang diiringi dengan peningkatan permintaan dan investasi sehingga terjadi pemupukan modal pengembangan usaha selanjutnya. Dengan demikian penyediaan modal melalui Dana Usaha Desa ini bukan saja memutus rantai kemiskinan yang menghinggapi keluarga miskin tetapi juga diharapkan akan menggerakkan ekonomi Desa tersebut.

Mengingat peran penting yang dimainkan oleh PPD melalui Dana Usaha Desa maka penelitian ini akan mengkaji mengenai Efektifitas Penyaluran Dana Usaha Desa Untuk Penanggulangan Kemiskinan di Desa Rambah Muda Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

1.2. Permasalahan

Program Pemberdayaan Desa menempatkan Dana Usaha Desa sebesar Rp 250 juta hingga Rp 500 juta per Desa yang dikelola oleh Usaha Ekonomi Desa–Simpan Pinjam (UED-SP) dengan pendampingan sebagai upaya mendekatkan modal usaha yang murah dan mudah untuk diakses oleh rumah tangga (penduduk miskin).

Meski secara teoritis, penyediaan modal yang mudah dan murah untuk diakses oleh rumah tangga miskin merupakan upaya yang strategis untuk memutus ‘lingkaran setan kemiskinan’, namun pengalaman menunjukkan bahwa program-program sejenis yang telah dilaksanakan mengalami kegagalan. Program Ekonomi Kerakyatan (PEK) Provinsi Riau yang dilaksanakan pada tahun 2001 dan 2002 dengan anggaran Rp 70,29 milyar dengan pelaksana teknis 7 dinas dan badan, secara umum berdasarkan evaluasi oleh BPKP dianggap gagal. Hal paling mendasar kegagalan PEK adalah rendahnya tingkat pengembalian pinjaman. Kredit Usaha Tani (KUT) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, juga dianggap gagal, yang ditunjukkan tingginya tunggakan kredit, termasuk tidak semakin meningkatnya produksi padi di Indonesia. Begitu juga dengan program pemberdayaan ekonomi melalui 13 kredit program di Pemerintahan Orde Reformasi juga kurang berhasil, bila tidak dapat dikatakan gagal (TKPK Provinsi Riau, 2005).

Disisi lain, ketika perekonomian Indonesia mengalami krisis ekonomi, sosial dan politik sebahagian besar masyarakat yang rentan jatuh kedalam kelompok masyarakat miskin, sehingga jumlah penduduk yang tergolong miskin meningkat tajam. Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan kemiskinan langsung ditujukan kepada masyarakat miskin melalui program bantuan sosial seperti JPS maupun stimulan.

Program yang relatif sama kembali berulang dengan kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM yang disusul dengan pemberian Subsidi Langsung Tunai (SLT). Program-program *charity* seperti ini justru menimbulkan efek negatif yaitu ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah, melumpuhkan inisiatif lokal dan kurang memberdayakan masyarakat serta tidak mendidik. Timbulnya persepsi dikalangan masyarakat bahwa semua program bantuan/pinjaman dari pemerintah 'tidak harus' dikembalikan karena kedepan akan 'diputihkan', muncul dikemudian.

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan utama penelitian ini adalah efektifitas penyaluran Dana Usaha Desa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan di Provinsi Riau khususnya di Kabupaten Rokan Hulu.

Secara khusus, pertanyaan penelitian ini adalah :

- a. Sesuikah besaran modal yang disalurkan melalui Dana Usaha Desa dengan kebutuhan modal yang dibutuhkan?
- b. Bagaimana tingkat pengembalian kredit Dana Usaha Desa PPD?
- c. Berapa peningkatan pendapatan penduduk miskin yang meminjam modal dari program Dana Usaha Desa?
- d. Bagaimanakah harapan dan penilaian masyarakat terhadap penyaluran Dana Usaha Desa?

1.3. Tujuan dan manfaat

A. Tujuan

Tujuan umum penelitian ini adalah menganalisis efektifitas penyaluran Dana Usaha Desa untuk meningkatkan pendapatan dan menanggulangi kemiskinan.

Adapun tujuan khususnya adalah :

1. Mengetahui besaran modal yang disalurkan melalui Dana Usaha Desa dengan kebutuhan modal yang dirasakan oleh penduduk miskin.
2. Mengetahui tingkat pengembalian kredit Dana Usaha Desa.

3. Menganalisis peningkatan pendapatan penduduk miskin yang meminjam modal Dana Usaha Desa.
4. Menyempurnakan atau membentuk strategi baru dalam peyaluran Dana Usaha Desa.

B. Manfaat

Menyumbangkan informasi terutama dalam penyempurnaan atau pembentukan strategi baru penyaluran Dana Usaha Desa merupakan manfaat dari penelitian ini selain sebagai wadah dalam mengaplikasikan ilmu akademis dengan kondisi riil lapangan.